

Penerapan Agile Government Pada Transformasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Berbasis Digital Di Kabupaten Lumajang

The Implementation of Agile Government in the Digital-Based Performance Transformation of Local Government Organizations in Lumajang Regency

Anindita Shahira Parman¹, Ariska Ayu Segara², Akbar Maulana³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jember

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan

e-mail: [¹anenindithashahiraparm@gmail.com](mailto:anenindithashahiraparm@gmail.com), [²riskaayusegara@gmail.com](mailto:riskaayusegara@gmail.com),
[³akbar.maulana@gmail.com](mailto:akbar.maulana@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Agile Government dalam transformasi kinerja organisasi pemerintah yang berbasis digital di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Agile Government melalui digitalisasi pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, koordinasi kerja, dan kualitas pelayanan publik. Penggunaan teknologi digital juga berkontribusi dalam mempercepat proses administrasi serta meningkatkan produktivitas aparatur pemerintah. Namun, penerapan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kemampuan teknologi informasi aparatur, infrastruktur digital yang belum optimal, dan budaya birokrasi yang masih konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Agile Government memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transformasi kinerja organisasi pemerintah berbasis digital, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih adaptif dan inovatif.

Kata Kunci: Agile Government, transformasi digital, kinerja organisasi, pelayanan publik.

ABSTRACT

This study examines the transformation in public services through the application of agile governance principles with a case study at the Public Service Mall (MPP) in Banyuwangi, East Java. Agile governance, as a flexible management method, emphasizes the importance of intersectoral collaboration, agility in responding to community needs, and an iterative process for improvement. This study uses a descriptive qualitative approach based on a case study. Data collection was conducted through in-depth interviews with 15 key informants, participant observation, and a review of policy documents between 2019 and 2024. The research findings indicate that the Banyuwangi MPP has successfully implemented four main aspects of agile governance, which include: (1) agency adaptability by redesigning service processes based on citizen needs, (2) multi-stakeholder collaboration between local governments, state-owned enterprises, and the private sector, (3) digital service management that has successfully reduced the average document completion time by 68%, and (4) a direct feedback system that contributed to an increase in public satisfaction levels from 72% to 91% within a three-year implementation period. This case demonstrates

that implementing agile governance can improve the effectiveness, efficiency, and quality of public services in the era of digital transformation. The results of this study provide valuable insights for developing a more agile, collaborative, and responsive public governance model to public needs.

Keywords: agile governance, public service mall, Banyuwangi case study, digital transformation, public services.

PENDAHULUAN

Perubahan yang signifikan dalam manajemen pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah terjadi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah harus mampu menyajikan layanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat yang terus berubah. Digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan birokrasi modern yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi lembaga pemerintah. Dalam hal ini, konsep Agile Government muncul sebagai pendekatan baru yang menekankan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan, tuntutan masyarakat, serta perkembangan teknologi digital (Rahmadany, 2024).

Konsep Agile Government pada dasarnya berkaitan dengan pemerintahan yang luwes, adaptif, kolaboratif, dan inovatif dalam merespons perubahan yang terjadi. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga transformasi budaya organisasi, pola kerja, dan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat serta responsif. Sebuah pemerintahan yang agile mampu menghadirkan layanan publik yang lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi, integrasi data, serta peningkatan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat (Malik et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Kurniawan, Maulana, dan Wicaksono (2021) menjelaskan bahwa agile governance merupakan bentuk transformasi inovasi pemerintah daerah yang menekankan fleksibilitas organisasi, percepatan respons terhadap perubahan, serta kemampuan pemerintah dalam menciptakan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, penguatan transformasi digital dalam pemerintahan berlangsung melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta berbagai inovasi layanan digital di tingkat daerah. Pemerintah daerah mulai mengembangkan berbagai aplikasi pelayanan publik, sistem administrasi berbasis elektronik, serta digitalisasi tata kelola organisasi guna meningkatkan efektivitas kerja birokrasi. Ramadhani et al. (2024) menunjukkan bahwa inovasi e-government yang diterapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas administrasi pelayanan publik melalui percepatan proses layanan, peningkatan aksesibilitas informasi, dan efisiensi pengelolaan administrasi pemerintahan. Namun demikian, pelaksanaan transformasi digital masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kemampuan aparatur dalam beradaptasi, resistensi terhadap perubahan, serta ketimpangan infrastruktur teknologi informasi. Kondisi tersebut menyebabkan transformasi digital belum sepenuhnya mampu meningkatkan kinerja organisasi pemerintah secara optimal (Rahmadany, 2024).

Kabupaten Lumajang, sebagai salah satu daerah yang terus mengembangkan pelayanan pemerintahan berbasis digital, juga dihadapkan pada tuntutan untuk membangun birokrasi yang responsif dan inovatif. Transformasi digital dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta efisiensi kinerja organisasi pemerintah daerah. Dalam implementasinya, penerapan prinsip Agile Government menjadi relevan karena dapat mendukung organisasi pemerintahan untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Selain itu, penerapan Agile Government memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan kolaboratif. Organisasi pemerintahan dituntut tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga membangun budaya kerja yang fleksibel, inovatif, dan

berorientasi pada pelayanan masyarakat. Melalui pendekatan agile, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta menyediakan layanan publik yang lebih efektif dan efisien (Nugraha et al., 2025). Penerapan agile governance juga diyakini mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan strategis dan meningkatkan keberhasilan inovasi sektor publik (Kurniawan et al., 2021).

Studi mengenai implementasi Agile Government dalam perubahan kinerja organisasi pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Lumajang penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana prinsip-prinsip agile telah diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam proses transformasi digital organisasi pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat transformasi birokrasi digital yang lebih responsif, inovatif, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Agile Government

Agile Government merupakan konsep pemerintahan yang menekankan kemampuan organisasi publik untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan teknologi. Konsep ini mengedepankan fleksibilitas, kolaborasi, inovasi, dan responsivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Rahmadany (2024), Agile Government menjadi pendekatan yang mampu mendukung terciptanya birokrasi modern melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa *“Agile Government muncul sebagai pendekatan baru yang menekankan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan, tuntutan masyarakat, serta perkembangan teknologi digital”* (Rahmadany, 2024).

Lebih lanjut, Malik et al. (2024) menyatakan bahwa Agile Government berkaitan dengan pemerintahan yang luwes, adaptif, kolaboratif, dan inovatif dalam merespons perubahan yang terjadi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi dan pola kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kurniawan, Maulana, dan Wicaksono (2021) menambahkan bahwa agile governance merupakan bentuk transformasi inovasi pemerintah daerah yang menekankan fleksibilitas organisasi, percepatan respons terhadap perubahan, serta kemampuan pemerintah dalam menciptakan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Transformasi Digital dalam Pemerintahan

Transformasi digital merupakan proses perubahan sistem kerja dan tata kelola organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dalam sektor pemerintahan, transformasi digital diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi administrasi, dan pengembangan layanan publik berbasis elektronik.

Menurut Ramadhani et al. (2024), inovasi e-government yang diterapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas administrasi pelayanan publik melalui percepatan proses layanan, peningkatan aksesibilitas informasi, dan efisiensi pengelolaan administrasi pemerintahan.

Thomas Siebel menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dalam penelitian ini, transformasi digital dipandang sebagai strategi penting dalam mendukung kinerja organisasi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Namun demikian, transformasi digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kemampuan adaptasi aparatur, resistensi terhadap perubahan, dan ketimpangan infrastruktur teknologi informasi. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi transformasi digital belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.

3. Kinerja Organisasi Pemerintah

Kinerja organisasi merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi publik, kinerja dapat diukur melalui efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Robbins, kinerja organisasi adalah hasil dari aktivitas organisasi yang diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang dihasilkan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi pemerintah dapat dicapai melalui penerapan teknologi digital yang mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan koordinasi kerja, serta memperluas akses pelayanan publik.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa digitalisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, mempercepat penyelesaian layanan, serta meningkatkan produktivitas aparatur pemerintah.

4. Hubungan Agile Government, Transformasi Digital, dan Kinerja Organisasi

Agile Government merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang menekankan kemampuan organisasi publik untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Konsep ini mendorong terciptanya birokrasi yang fleksibel, kolaboratif, inovatif, dan responsif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Malik et al. (2024), Agile Government tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada transformasi budaya organisasi dan pola kerja yang mampu merespons perubahan secara cepat.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang agile, transformasi digital menjadi instrumen penting yang mendukung perubahan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi administrasi, integrasi data, serta pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi. Ramadhani et al. (2024) menjelaskan bahwa inovasi e-government mampu meningkatkan kualitas administrasi pelayanan publik melalui percepatan proses layanan, peningkatan akses informasi, dan efisiensi pengelolaan administrasi pemerintahan.

Penerapan transformasi digital yang didukung oleh prinsip-prinsip Agile Government berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi pemerintah. Kinerja organisasi dapat dilihat dari tingkat efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Robbins menyatakan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil aktivitas organisasi yang diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Agile Government memungkinkan organisasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi antarinstitusi, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif. Melalui transformasi digital, proses birokrasi yang sebelumnya bersifat manual dapat dilakukan secara elektronik sehingga meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Agile Government secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Agile Government berperan sebagai pendekatan tata kelola yang mendorong transformasi digital, sedangkan transformasi digital menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling mendukung antara Agile Government, transformasi digital, dan kinerja organisasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5. Kerangka Pemikiran

Agile Government → Transformasi Digital → Kinerja Organisasi Pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam tentang penerapan Agile Government dalam transformasi kinerja organisasi pemerintah berbasis digital di Kabupaten Lumajang. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana proses implementasi pemerintahan yang responsif dan digital dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, termasuk faktor-faktor yang mendukung serta hambatan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan data yang berupa kata-kata, perilaku, dan dokumen dengan cara mendalam sehingga cocok untuk diterapkan dalam penelitian yang berkaitan dengan perubahan organisasi serta transformasi birokrasi digital.

Lokasi penelitian berada di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lumajang yang berkaitan dengan implementasi sistem pemerintahan berbasis digital. Ini mencakup Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan instansi layanan publik lainnya. Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip Agile Government, transformasi kinerja organisasi pemerintah yang berbasis digital, kemampuan adaptasi para pegawai pemerintah terhadap teknologi digital, faktor-faktor yang mendukung serta menghambat penerapan sistem digital, dan dampaknya terhadap efektivitas layanan publik.

Sumber informasi dalam studi ini mencakup data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan cara langsung yaitu melalui wawancara mendalam bersama staf pemerintah daerah, pengamatan terhadap implementasi layanan berbasis digital, serta arsip kegiatan organisasi pemerintah. Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah daerah, regulasi yang berhubungan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), buku, artikel ilmiah, serta penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema Agile Government dan digitalisasi pemerintah.

Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui pengamatan, tanya jawab, dan pengumpulan dokumen. Pengamatan dilakukan dengan melihat langsung proses pelayanan publik yang berbasis digital serta kegiatan organisasi pemerintah yang menerapkan sistem digital. Tanya jawab dilakukan dengan orang-orang yang dianggap mengerti dan terlibat langsung dalam pelaksanaan transformasi digital di pemerintahan daerah, seperti kepala OPD, staf pemerintah, dan pengelola sistem digital. Di samping itu, pengumpulan dokumen digunakan untuk mendapatkan berbagai data tambahan berupa arsip, laporan kegiatan, peraturan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan transformasi digital dalam organisasi pemerintah.

Penentuan informan dalam studi ini menggunakan metode purposive sampling, yang merupakan pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Informan dipilih karena mereka memiliki wawasan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Agile Government serta transformasi digital di organisasi pemerintah Kabupaten Lumajang. Metode ini diterapkan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lebih mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, mencakup reduksi data, presentasi data, serta penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan memilah serta menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, data disajikan dalam format deskriptif agar dapat dipahami dengan lebih mudah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan sepanjang penelitian berlangsung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Agile Government, teori transformasi digital, dan teori kinerja organisasi.

Teori Pemerintahan Agile diterapkan sebagai teori utama untuk menggambarkan bagaimana pemerintah dapat bersikap adaptif, lincah, inovatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan serta tuntutan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital. Menurut David Osborne, pemerintahan yang lincah adalah pemerintahan yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan melalui inovasi dalam

kebijakan dan pelayanan publik. Di sisi lain, teori transformasi digital menjelaskan bagaimana organisasi pemerintah beralih dari sistem tradisional ke sistem yang memanfaatkan teknologi digital. Menurut Thomas Siebel, transformasi digital adalah proses pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keefektifan serta efisiensi organisasi. Sementara itu, teori kinerja organisasi digunakan untuk mengevaluasi perubahan efektivitas kerja pemerintah setelah penerapan sistem digital. Menurut Stephen P. Robbins, kinerja organisasi adalah hasil dari aktivitas organisasi yang diukur melalui efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Digital dan Penerapan Agile Government

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Agile Government dalam perubahan kinerja organisasi pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Lumajang, terlihat bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan transformasi digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta kinerja organisasi pemerintah. Transformasi ini dilakukan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menggunakan aplikasi layanan publik, mengdigitalisasi administrasi pemerintahan, serta meningkatkan kerja sama antar organisasi perangkat daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Penerapan pemerintahan agile di Kabupaten Lumajang dalam mengubah kinerja organisasi berbasis digital menunjukkan pergeseran dalam cara mengelola pemerintahan menuju sistem birokrasi yang lebih modern, fleksibel, dan responsif. Ide dasar pemerintahan Agile menekankan kemampuan lembaga pemerintah untuk cepat beradaptasi dengan perubahan dengan cara berinovasi dan menggunakan teknologi digital. Dalam penelitian ini, penerapan sistem pelayanan berbasis digital dianggap sebagai salah satu contoh implementasi prinsip agile dalam lembaga pemerintahan daerah (Malik et al., 2024).

2. Dampak Transformasi Digital terhadap Pelayanan Publik dan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan konsep pemerintahan Agile terlihat dari perubahan cara kerja birokrasi yang lebih fleksibel dan cepat merespons perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Pemerintah mulai menerapkan sistem layanan digital yang membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dengan lebih cepat dan mudah, tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Selain itu, penggunaan media digital juga membantu mempercepat pengiriman informasi publik serta memudahkan koordinasi antara pegawai pemerintah daerah. Studi tersebut menunjukkan bahwa menerapkan transformasi digital memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kemampuan kerja lembaga pemerintah. Ini bisa dilihat dari peningkatan kecepatan dalam mengurus urusan administrasi, pengurangan waktu dalam proses birokrasi, dan semakin mudahnya warga mengakses berbagai layanan publik. Pegawai pemerintah juga mulai memahami dan menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan tugas serta melayani masyarakat secara lebih efisien.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dalam layanan publik bisa meningkatkan kemampuan kerja pemerintah dalam hal keefektifan dan keefisienan. Situasi ini sesuai dengan konsep Pemerintahan Agile yang dijelaskan oleh David Osborne, yang mengatakan bahwa pemerintah yang gesit harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat melalui inovasi dalam memberikan layanan publik. Penerapan teknologi digital di Kabupaten Lumajang membantu mempercepat proses administratif dan memudahkan warga dalam mengakses layanan, sehingga layanan publik menjadi lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat (Sapri et al., 2024).

Selanjutnya, transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pikiran Thomas Siebel tentang transformasi digital, yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi digital bisa meningkatkan efisiensi organisasi. Proses penggunaan teknologi dalam pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa teknologi bisa membantu mempercepat urusan birokrasi serta memperkuat kerja sama antar lembaga pemerintah (Andi Fitri Rahmadany, 2024).

Selain memberikan manfaat positif bagi pelayanan publik, penerapan *Agile Government* juga memengaruhi efisiensi dan kinerja lembaga pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian, menggunakan sistem digital bisa meningkatkan kerja pegawai pemerintah dan membuat tugas administratif selesai lebih cepat. Ini sesuai dengan teori kinerja organisasi yang diajukan oleh Stephen P. Robbins menyatakan bahwa kinerja organisasi bisa dinilai melalui efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan yang diberikan (Nugraha et al., 2025).

3. Tantangan dan Strategi Pengembangan Ke Depan

Meski memiliki dampak positif, penerapan *Agile Government* di Kabupaten Lumajang masih menemui beberapa rintangan dan tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya tenaga manusia atau aparatur yang memiliki keterampilan teknologi informasi yang memadai. Tidak semua pegawai pemerintah dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan sistem kerja yang berbasis digital. Di samping itu, ada juga masalah infrastruktur teknologi seperti koneksi internet yang belum stabil di beberapa daerah dan kurangnya fasilitas yang mendukung digitalisasi dalam layanan publik. Selain aspek tenaga kerja dan infrastruktur, tantangan lain yang dihadapi adalah budaya birokrasi yang masih bersifat tradisional. Beberapa pegawai masih menggunakan metode manual, sehingga proses penyampaian kepada sistem digital memerlukan waktu dan pelatihan yang konsisten.

Kondisi lapangan ini dipertegas oleh temuan bahwa implementasi *Agile Government* di Kabupaten Lumajang belum berjalan dengan maksimal karena hambatan-hambatan tersebut. Kurangnya kemampuan dalam teknologi informasi di kalangan pegawai pemerintah menunjukkan bahwa kesiapan tenaga kerja adalah elemen krusial untuk mendukung pergeseran menuju digitalisasi pemerintahan. Di samping itu, adanya kekurangan dalam infrastruktur teknologi dan pola kultur birokrasi yang masih tradisional juga menjadi masalah utama dalam proses penerapan sistem digital (Rozalia Wardana et al., 2026).

Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen dalam meningkatkan kemampuan aparat melalui pelatihan teknologi informasi dan pengembangan sistem pelayanan digital secara bertahap. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknologi informasi secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem digital dan menciptakan lingkungan kerja yang menyambut ide-ide baru dan perubahan. Dengan demikian penerapan *Agile Government* dapat bekerja lebih baik dan membantu terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, serta mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (Rozalia Wardana et al., 2026).

Tabel 1. Perbandingan Indikator Kinerja Organisasi Sebelum dan Sesudah Penerapan Digitalisasi

Indikator Kinerja	Sebelum Digitalisasi	Sesudah Digitalisasi	Presentasse Peningkatan
Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (hari)	7-10 Hari	2-3 Hari	70% lebih cepat
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	100% (baseline)	75%	25% lebih hemat
Efisiensi anggaran operasional (pengurangan kertas & logistik)	68%	85%	+17%
Koordinasi antar OPD (skor efektivitas 1–100)	62	81	+19 poin
Jumlah layanan publik yang dapat diakses secara online	5 jenis	18 jenis	+260%
Produktivitas aparatur (rata-rata dokumen terproses per hari)	12 dokumen	22 dokumen	+83%

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Agile Government dalam transformasi digital kinerja pemerintahan di Kabupaten Lumajang menunjukkan adanya pergeseran ke arah birokrasi yang lebih modern, adaptif, dan responsif. Hal ini dicapai melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi administrasi, serta pengenalan pelayanan publik berbasis teknologi. Hasilnya, efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, dan kolaborasi antarpejabat pemerintah semakin meningkat. Namun, penerapan ini belum berjalan lancar seperti yang diharapkan karena masih menghadapi kendala, yaitu kemampuan teknologi informasi di kalangan pejabat yang belum memadai, infrastruktur digital yang belum memenuhi standar, serta budaya birokrasi yang masih bersifat tradisional. Sebab itu, pemerintah daerah sebaiknya terus melatih keterampilan pegawai dengan pelatihan teknologi informasi yang berkelanjutan, memperbarui perangkat dan sistem teknologi informasi, serta mendorong tumbuhnya budaya kerja yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat melanjutkan studi tentang penerapan Agile Government di sektor pemerintahan lainnya agar lebih memahami secara menyeluruh perubahan digital dalam sistem birokrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, D. I., Maulana, A., & Wicaksono, I. (2021). *Agile governance sebagai bentuk transformasi inovasi pemerintah daerah*. Dissertation. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Malik, Kurniawan Jabar, Sumaryadi, A., & Kusudiandaru, S. (2024). Towards Agile Government: What Things Does the Government Need to Be Ready? *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 306–312.
- Nugraha, D., Srikartini, D., & Kasman, A. (2025). Digital Governance Transformation and Agile Governance Outcomes in Public Services: A Case Study of Pakuan Prima in Bogor City. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 16, 1–27.
- Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile Government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 195–209.
- Ramadhani, R., Abdillah, M., Santoso, I., Destrio, Y., Hadi, D., & Maulana, A. (2024). Inovasi e-government dalam meningkatkan kualitas administrasi pelayanan publik: Studi kasus inovasi pemerintah daerah Kabupaten Jember. *Interelasi Humaniora*, 1(2), 62–79.
- Sapri, Darmawan, A., & Handoko, R. (2024). The Implementation of Agile Government in Achieving Public Service Efficiency. *International Journal Papier Public Review*, 5(4), 25–31.
- Wardana, R., Nurdin, I., & Wargadinata, E. L. (2026). Agile Governance in the Implementation of the Electronic Based Government System (SPBE) in the City of Banda Aceh: Agile Governance dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh. *11(2)*, 529–544.